

Daftar Pustaka

Buku

- Fakih, Mansour. (2020). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Insist Press: Yogyakarta.
- Hartati, Sri. (2020). *Gender Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya. Tersedia dalam iPusnas.
- Nugroho, Riant. (2008). *Pengarusutamaan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. (2018). *Pubic Policy*. Elex Media Computindo: Jakarta.
- Santoso, Urip. (2016). *Hukum Perumahan*. Prenamedia Group: Jakarta. Tersedia dalam iPusnas.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Studi Kasus)*. Nusamedia: Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS: Yogyakarta.

Jurnal

- Cahyaninghati, Made Ruth, I Made Gde Sudharsana, dan Ni Diah Ambarwati Kardinal. (2021). *Evaluasi Program Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Buleleng*. Jurnal ENMAP, 2(1).
- Hardy, I Gusti Ngurah, Rifat Maromon, dan Debri Amabi. (2020). *Kajian Proses Pengembangan Rumah Subsidi Secara Mandiri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Gwang, 2(2).
- Kusumastuti, Dora. (2015). *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Rumah Subsidi di Sektor Perumahan*. Jurnal Yustisia, 4(3).
- Sulistiyowati, Yuni. (2020). *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*. Journal of Gender Studies, 1(2).
- Wiasti, Ni Made. (2017). *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender*. Journal of Antropology, 1(1).

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Road Map Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024

Artikel

Kriyantono, Rachmat,. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada (https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pendapatan-penduduk-indonesia-meningkat-menjadi-rp-622-juta-per-tahun>



Lampiran Transkrip Wawancara

Informan Penelitian	Kepala Bagian Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran
Inisial Informan	Ibu D.N.W
Hari/Tanggal	Kamis, 16 Juni 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Apa yang menjadi tujuan dari program rumah subsidi?

B: Sesuai dengan prinsip dan komitmen dari Kementerian PUPR tentang pengarusutamaan gender, maka seluruh program yang menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR disesuaikan dengan *Road Map* Pengarusutamaan Gender yang sedang berlaku. Sederhananya, tujuan dari program ini kan agar kelompok rentan yakni masyarakat berpenghasilan rendah bisa mempunyai rumah sendiri yang layak huni. Melalui program ini, ada beberapa skema pembiayaan yang diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan. *Road Map* Pengarusutamaan Gender yang sedang berlaku tersebut kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan program nantinya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip PUG atau tidak. Jika tidak, kita biasanya akan evaluasi di periode-periode tertentu.

A: Sejauh mana kebijakan ini telah direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan?

B: Karena DJPI berfokus pada pembiayaan rumah subsidi, maka di kami realisasinya berupa penyaluran skema pembiayaan KPR bersubsidi yang telah ada. Untuk rata-rata dalam satu tahun, jumlah realisasi yang bisa kami lakukan sebanyak 202.666 unit per tahun. Angka tersebut dihitung sejak tahun 2015. Kemudian, untuk SBUM yang statusnya sebagai pelengkap dari SSB dan FLPP rata-rata realisasinya sebanyak 139.579 unit per tahunnya. Khusus di tahun 2021, realisasi FLPP per tanggal 31 Oktober 2021, realisasi telah dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan nilai Rp 19,57 triliun untuk 178.728 unit. Hal tersebut jauh di atas target yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR yakni sebesar 113,48 persen

A: Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan program ini?

B: Melanjutkan jawaban yang tadi saya berikan, maka tolok ukur keberhasilan dari program ini tentu mengenai realisasi pembiayaan rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika pencapaian realisasi sesuai dengan target atau bahkan melampaui target maka saya bisa mengatakan bahwa program ini berhasil terlaksana. Karena itu, di awal tahun ini, Kementerian PUPR meminta BP Tapera untuk meningkatkan penyaluran subsidi perumahan bagi MBR. Ketika makin banyak MBR yang memiliki rumah layak huni maka tentunya semakin bagus. Namun, ada catatan penting juga, agar program ini bisa berhasil tentu mesti diimbangi dengan pembangunan rumah subsidi baik itu rumah susun atau tapak oleh Ditjen Perumahan.

A: Bagaimanakah kondisi sosial dan ekonomi yang ideal agar program rumah subsidi bisa mencapai tujuannya?

B: Kalau untuk kondisi ekonomi yang ideal, saya berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil bahkan naik dari tahun 2021. Bisa dilihat saat awal pandemi di 2020, jumlah pengajuan KPR bersubsidi jauh menurun dari periode sebelumnya. Sebab di awal pandemi lalu kan daya beli masyarakat turun drastis sehingga kebutuhan papan (rumah) dikesampingkan karena kebutuhan pokok yang menjadi utama. Untuk kondisi sosialnya, agar program ini bisa mencapai tujuan, masyarakat atau calon debitur sesuai dengan PERMEN memiliki pengetahuan dan kemauan untuk memiliki rumah subsidi. Mereka-mereka harus lebih aktif bertanya kepada tetangga atau Bank Pelaksana mengenai persyaratan pengajuan KPR Bersubsidi.

A: Apakah Kementerian PUPR melibatkan organisasi non pemerintah (LSM) dalam proses penyusunan program agar sesuai dengan kebutuhan praktis gender

B: Dalam penyusunan program, kita tidak melibatkan LSM atau organisasi non pemerintah. Setahu saya, peran LSM dalam pemerintah ada di penyusunan undang-undang di DPR sana. Kalau di kita kan nanti *output*-nya peraturan menteri di mana hanya melibatkan internal saja. Penyusunan program KPR bersubsidi ini kan berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Jadi, dari tahap perencanaan dan penyusunan dilakukan di masing-masing direktorat yang berada di bawah komando DJPI Kementerian PUPR, tinggal disesuaikan saja dengan tugas dan fungsinya agar tercipta harmonisasi kebijakan antar unit organisasi.

A: Sejauh mana elite eksekutif di luar Kementerian PUPR memberikan dukungan terhadap implementasi program ini?

B: Kalau untuk dukungan materil (anggaran) jelas tidak ya, tetapi dukungannya berupa imateril. Biasanya dukungan imateril itu bentuknya seperti apresiasi yang diberikan oleh pimpinan organisasi lain kepada Kementerian PUPR. Misalnya apresiasi yang diberikan oleh Direktorat KPAPO Bappenas terhadap Kementerian PUPR dalam hal *tagging* anggaran tematik gender. Kemudian ada juga rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Ketua KPAI mengenai penyelenggaraan infrastruktur yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi, dukungan-dukungan yang diberikan oleh elite eksekutif di luar dari Kementerian PUPR biasanya berupa apresiasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

A: Apakah pegawai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan program rumah subsidi sesuai dengan Road Map Pengarusutamaan Gender

B: Untuk meningkatkan kemampuan dari pegawai, di Kementerian PUPR punya kalender pendidikan dan pelatihan tiap tahunnya. Misalnya pelatihan mengenai KPBU. Kan program rumah subsidi ini menggunakan skema KPBU dalam pelaksanaannya. Di pelatihan tentang KPBU itu, kita menekankan pemahaman peserta (pegawai) mengenai terhadap KPBU. Sehingga ketika sudah bertugas kembali nantinya, ia memiliki wawasan dan pengetahuan tentang KPBU di Kementerian PUPR. Kemudian ada juga pelatihan mengenai pembiayaan proyek perumahan yang pengajarnya berasal bisa pejabat struktural atau fungsional di Kementerian PUPR. Di pelatihan tersebut, pegawai nantinya bisa menerapkan dan menganalisis proses bisnis pembiayaan proyek perumahan sesuai dengan UU serta mempertimbangkan perencanaan dan pengembangan teknologi pembangunan perumahan. Lalu kita juga pernah menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang perumahan.

Trankrip Wawancara

Informan Penelitian	Direktur Pelaksana Pembiayaan Perumahan
Inisial Informan	Bapak H.B.M
Hari/Tanggal	Kamis, 16 Juni 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program rumah subsidi di tahun 2022?

B: Untuk alokasi program rumah subsidi ini terbagi ke dalam beberapa program. Program rumah subsidi ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu untuk 200 ribu unit totalnya Rp 23 triliun. Kemudian, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang menyertai FLPP tadi, itu untuk 200 ribu unit juga dan anggarannya sekitar Rp 812 miliar. Ketiga, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) itu untuk 22.500 unit sekitar Rp 888 miliar. Satu lagi ada namanya dana yang dialokasikan untuk membayar Subsidi Selisih Bunga (SSB) atas akad-akad kredit yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya (2016-2021) itu jumlahnya Rp 4 triliun untuk pembayaran atas selisih bunga. Alokasi dana tersebut yang masuk ke dalam APBN.

A: Adakah insentif yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah membeli rumah subsidi melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Kementerian PUPR?

B: Untuk insentif selain mendapatkan subsidi bantuan, ya, kalau FLPP itu mereka (MBR) membayar suku bunga 5%. Kalau misalnya suku bunga di pasar 10% atau 11%, si MBR itu diberikan insentif hanya membayar suku bunga 5%. Itu sudah bagian dari insentif dari pemerintah kepada MBR. Di samping itu, pemerintah juga membebaskan PPN atas rumah yang mereka beli dengan harga tertentu jadi tidak seluruhnya mendapatkan pembebasan PPN. Di beberapa lokasi ada pengurangan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)".

A: Apakah DPPP rutin melaksanakan rapat teknis terkait pelaksanaan pembiayaan rumah subsidi

B: Ya, tentu saja. Kami melaksanakan rapat berkala untuk mengorganisir penyaluran bantuan perumahan. Tiap semester biasanya dilaksanakan evaluasi akhir atau di triwulan 1, 2, atau 3. Rapat koordinasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan baik.

A: Apakah DPPP sebagai pelaksana pembiayaan program rumah subsidi mendapatkan bantuan teknis dari Ditjen lain saat proses implementasi program?

B: Kalau untuk bantuan teknis kami memiliki tim untuk melakukan itu. Memang jika diperlukan untuk mendapatkan bantuan dari yang lain tetapi itu lebih ke rencana aksi. Kami juga bisa merekrut orang-orang tertentu jika memang diperlukan untuk keberhasilan program. Kalau dirinci, maka bantuan teknis yang biasanya kami dapatkan berasal direktorat lain seperti spesifikasi bangunan rumah yang berada di bawah kewenangan Ditjen Perumahan. Kemudian sertifikasi bangunan gedung yang berada di Ditjen Cipta Karya. Lalu, Bantuan prasarana dan sarana umum di Direktorat Rumah Umum Komersial.

A: Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, permasalahan apa yang sering muncul ketika pelaksanaan FLPP?

B: Permasalahan yang sering muncul saat monitoring dan evaluasi (monev) untuk pelaksanaan adalah: (1) pemanfaatan dari subsidiya. Yakni masih banyak ditemui rumah subsidi yang tidak segera dihuni oleh penerima manfaat dengan alasan seperti sedang dilakukan renovasi/perbaikan rumah, faktor keluarga, pekerjaan, dan alasan lainnya; (2) kemudian dari kualitas bangunannya, kalau untuk kualitas bangunannya biasanya berkaitan dengan spesifikasi, memenuhi standar atau tidak yang dibangun oleh pengembang; dan (3) dari sisi ketepatan sasaran, yakni banyak penerima manfaat yang telah mengalami kenaikan besaran penghasilan sejak pengajual di awal sehingga mereka bukan termasuk kelompok sasaran lagi.

A: Apakah struktur birokrasi dari DJPI berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program?

B: Program ini kan dijalankan oleh satuan kerja ya, Mas. Untuk FLPP tadi dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA). Di sana sudah ada tim, secara organisasi berarti sudah kuat. Jadi sebenarnya struktur organisasi dari sisi penyaluran atau pelaksanaan ya boleh dikatakan sudah memadai untuk keberhasilan program.

A: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR agar implementasi program sesuai dengan Road Pengarusutamaan Gender?

B: Di DPPP ada skema penyaluran dana subsidi, memang ini diatur dalam suatu regulasi. Ada mekanisme yang diatur di sana (regulasi). Jadi, kami menyalurkan bantuan ini berdasarkan kerja sama dengan perbankan. Perbankan yang menyalurkan bantuan. Kita (DPPP) melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) setelah itu pelaksanaannya. Di sini ada kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, debitur (MBR) harus sesuai dengan kelompok sasaran yang ada di peraturan menteri (Permen). Juga memastikan bahwa bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang itu sesuai dengan kesepakatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian mengenai pembangunan rumah, maka yang kita lakukan ialah memberikan pembinaan terhadap pengembang tersebut.

A: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR agar program ini bisa sesuai dengan *Road Map* Pengarusutamaan Gender?

B: Kalau kita baca lagi, tujuan dari pengarusutamaan gender itu memastikan tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah baik di tahap persiapan, penyaluran, ataupun pasca penyaluran. Untuk mekanisme pengawasannya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR agar implementasi program kemudahan dan bantuan sesuai dengan tujuan PUG di Kementerian PUPR yakni tidak ada pembatasan antara pemohon laki-laki atau perempuan selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, masyarakat dapat mengakses bantuan kemudahan melalui aplikasi SIKASEP atau Bank Penyalur KPR sepanjang memenuhi persyaratan. Kemudian, dalam aspek manajemen keuangan, debitur perempuan umumnya lebih baik dibanding debitur laki-laki. Kemampuan perempuan dalam mengelola pengeluaran semestinya bisa menjadi dasar pertimbangan yang positif dari lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman. Namun demikian, penilaian fisibilitas seorang debitur tetap merupakan kebijakan analisis kredit pada lembaga keuangan

Trankrip Wawancara

Informan Penelitian	Kasubdit Kemudahan dan Bantuan
Inisial Informan	Bapak S.S
Hari/Tanggal	Kamis, 16 Juni 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Apakah partisipasi masyarakat untuk mengajukan KPR bersubsidi terus meningkat tiap tahunnya

B: Kalau kita lihat data-data dari sisi anggaran maupun yang terdaftar sebagai debitur tiap tahun meningkat. Bahkan, di tahun-tahun tertentu anggaran yang kita alokasikan tidak mencukupi permintaan dari para debitur (MBR) itu.

A: Apakah program rumah subsidi sudah menjadi jawaban dari kebutuhan praktis gender terhadap kepemilikan rumah pribadi?

B: Menurut saya, program ini sudah bisa dikatakan menjadi jawaban dari kebutuhan praktis gender untuk memiliki rumah pribadi yang layak huni. Saya bisa berkata demikian karena program ini tidak dibatasi gender. Berdasarkan data realisasi SSB/SSM, FLPP, dan BP2BT tahun 2015-2020, pemanfaat program pembiayaan perumahan dan pemerintah adalah pria sedangkan 32 persen sisanya adalah pemanfaat perempuan. Tapi, ada yang perlu ingat, bahwa data di atas tidak bisa menggambarkan partisipasi perempuan secara utuh dikarenakan sistem penilaian perbankan tetap mengacu pada kebijakan internal terkait aspek manajemen risiko kredit yang didasarkan terutama atas kemampuan mengangsur paling baik (antara pasangan kawin) bukan berdasarkan gender.

A: Kendala seperti apa yang sering dijumpai saat implementasi program rumah subsidi?

B: Kalau dari sisi pemerintah, kendala yang sering terjadi ialah pemenuhan persyaratan oleh debitur (MBR). Karena kita harus memastikan bahwa debitur (MBR) ini merupakan masyarakat yang sesuai. Artinya tidak boleh masyarakat yang sudah kaya yang memanfaatkan fasilitas ini. MBR ini kadang-kadang dokumentasi mereka tidak lengkap. Dari sisi perbankan, ada sebagian MBR yang memiliki *credit card* dan dianggap tidak patuh

mengangsur dan bisa menolak pengajuan mereka karena dianggap bermasalah dalam kredit. Terus ada kendala juga dari sisi bangunan rumahnya. Rumah subsidi yang dibangun belum dilengkapi Prasarana dan Sarana Umum (PSU) sehingga belum dapat dilakukan akad, meskipun Surat Pernyataan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sudah diterbitkan oleh Bank Pelaksana. Alhasil, banyak ditemukan SP3K sudah *expired* dan harus diperbarui.

Trankrip Wawancara

Informan Penelitian	Kasubdit Kerjasama dan Investasi
Inisial Informan	Bapak S
Hari/Tanggal	Kamis, 16 Juni 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Berasal dari manakah sumber pembiayaan terbesar rumah subsidi, apakah dari APBN atau KPBU?

B: Kalau dari APBN, anggaran rumah subsidi hanya 30% dan sisanya yakni 70% berasal dari skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Sehingga kita melibatkan swasta untuk masuk dalam rangka menghilangkan *funding gap* tersebut. Pembiayaan subsidi ini diberikan untuk sisi *demand* (permintaan) masyarakat untuk membeli rumah subsidi.

A: Apa yang menjadi risiko terbesar dari skema KPBU dalam pembangunan rumah subsidi?

B: Mengenai risiko terbesar, dalam pembangunan perumahan, yakni kesulitan mencari investor karen proyeknya kurang menarik. Untuk menawarkan itu, tentu kita persiapkan secara matang dan rinci dan bisa kita jual atau lelang kepada investor. Jadi, seringkali dalam alokasi pembagian risiko, pemerintah memiliki risiko dalam penyediaan lahan sementara swasta memiliki risiko di konstruksi bangunan.

Trankrip Wawancara

Informan Penelitian	Warga Pemilik Unit Subsidi Rusunami Bandar Kemayoran
Inisial Informan	Bapak F.A.A
Hari/Tanggal	Sabtu, 2 Juli 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Sejak kapan Anda menempati hunian subsidi di Rusunami Bandar Kemayoran?

B: Saya menempati rumah ini dari tahun 2018, Mas.

A: Sebelum tinggal di sini, apakah Anda sudah memiliki rumah pribadi atau menyewa rumah?

B: Sebelumnya saya memang belum memiliki rumah, jadi setelah menikah masih tinggal di rumah orang tua. Karena pengen punya rumah sendiri, makanya saya ngajuin ke bank untuk bisa beli unit rumah ini.

A: Untuk mendapatkan rumah ini, fasilitas pembiayaan apa yang Anda gunakan, FLPP, SBUM atau SSB?

B: Waktu itu saya pakainya FLPP, mas. Terus sepaket tuh dapat bantuan uang muka juga (SBUM). Jadi saya bayar uang mukanya lebih ringan.

A: Apakah rumah ini menjadi solusi dari permasalahan mengenai tempat tinggal yang Anda alami sebelumnya?

B: Menurut saya iya, mas. Penghasilan saya sama istri kan tidak besar ya walaupun sudah digabung. Tapi karena ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kecil makanya kami bisa punya rumah.

A: Apakah fasilitas yang disediakan oleh pengembang sudah responsif gender, dalam artian bisa dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan?

B: kalau fasilitas yang bisa digunakan semua orang paling yang kaya tempat ibadah sih, mas. Di bawah kan ada masjid tuh bisa buat salat jamaah. Terus ada taman kecil juga bisa buat main anak-anak.

Trankrip Wawancara

Informan Penelitian	Warga Pemilik Unit Subsidi Rusunami Bandar Kemayoran
Inisial Informan	Ibu D
Hari/Tanggal	Sabtu, 2 Juli 2022

A: Peneliti

B: Informan

A: Sejak kapan Anda menempati rumah ini?

B: saya sih belum lama, bang, tinggal di sini. Saya tinggal di sini awal tahun 2020. Sebelum covid-19 deh pokoknya.

A: Sebelum tinggal di sini, apakah Anda sudah memiliki rumah pribadi atau menyewa rumah?

B: sudah, bang. Dulu saya tinggal di Gunungputri, Bogor. Cuma karena saya ikut suami kerja di Jakarta, maka rumah di sana saya sewakan untuk tambah-tambah bayar angsuran rumah ini.

A: Untuk mendapatkan rumah ini, fasilitas pembiayaan apa yang Anda gunakan, FLPP, SBUM atau SSB?

B: Waktu itu sih suami pernah bilang kalau pake bantuan yang FLPP itu, mas. Saya nggak begitu ngerti karena yang ngurus semuanya tuh semua. Saya Cuma bantu-bantu menyiapkan peryaratannya saja.

A: Apakah rumah ini menjadi solusi dari permasalahan mengenai tempat tinggal yang Anda alami sebelumnya

B: Bisa dibilang iya sih, mas. Walaupun awalnya kami pengen rumah tapak di Jakarta tapi karena harganya yang udah mahal banget jadinya kami pilih unit subsidi aja di Rusunami ini. yang penting kan kami masih punya rumah tapak di Bogor.

A: Apakah fasilitas yang disediakan oleh pengembang sudah responsif gender, dalam artian bisa dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan?

B: mungkin kaya fasilitas publik gitu ya, mas. Di sini ada masjid di bawah, bisa dipake sama siapa aja yang mau ibadah. Terus ada PAUD juga jadi warga sini bisa daftarin anaknya ke PAUD untuk belajar. Paling sama taman tuh buat main anak-anak kalo sore.



skripsi FRP

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	2%
2	simantu.pu.go.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	bpsdm.pu.go.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	ppdpp.id Internet Source	1%
7	jdih.pu.go.id Internet Source	<1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Lee County High School Student Paper	<1%